



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL WIDIASTUTI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 673757

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.820.000.000

1. Tanah Seluas 893 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Bangunan Seluas 30 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Bangunan Seluas 30 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Bangunan Seluas 44 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Bangunan Seluas 21 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
6. Tanah Seluas 290 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/31 m2 di KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 387.700.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA/V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	77.200.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	564.241.432
F. HARTA LAINNYA	Rp.	153.576.312
Sub Total	Rp.	5.002.717.744
III. HUTANG	Rp.	37.000.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.965.716.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.